

# Dosen FISIP UPNVJ Bahas Anomali Politik Hukum Siber di Webinar Nasional Nusantara Hukum

Senin, 05 Januari 2026 16:11 WIB

**DEFINISI SIBER**

**Siber** memiliki makna yang berarti dunia maya atau segala sesuatu yang berkaitan dengan sistem komputer, informasi, dan internet, yang mencakup aspek-aspek kehidupan digital seperti komunikasi, transaksi ekonomi, dan interaksi sosial.

Internet menjadi infrastruktur utama yang memungkinkan aktivitas "siber" berlangsung, memungkinkan komunikasi dan interaksi secara daring.

Keamanan Siber  
Kejahatan Siber  
Hukum Siber

Reja

NUSANTARA HUKUM

ARDIANA ROSITA SA...

**POLITICS**

Komunitas terkait Siber  
Ada Tujuan Pembuatan Kebijakan terkait Siber  
Ada Bentuk Keputusan (Kebijakan) Hukum

Reja

ARDIANA ROSITA SA...

**HumasUPNVJ** - Reja Dalimunthe, B.A., M.M.P.A., dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ), menjadi pembicara utama dalam webinar nasional bertopik "Politik Hukum Siber di Indonesia". Acara diselenggarakan Komunitas Nusantara Hukum

secara daring pada Desember lalu, diikuti puluhan peserta dari mahasiswa hingga pengacara serta profesional hukum. Webinar ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep dasar politik hukum siber, penerapan kebijakan di Indonesia, serta membuka ruang diskusi antar ahli dan praktisi mengenai tantangan implementasi, melalui pendekatan sederhana yang fokus pada infrastruktur dan kebijakan.

Reja Dalimunthe menyederhanakan pembahasan kompleks menjadi dua komponen utama, yaitu infrastruktur siber dan kebijakan pendukungnya. Ia menyoroti anomali seperti tumpang tindih peraturan era digital, ketiadaan kebijakan komprehensif, serta ketimpangan infrastruktur yang lebih mengutamakan kuantitas daripada kualitas. "Ketimpangan infrastruktur yang seakan ada tapi tidak berkualitas, hanya sekedar kuantitas itu adalah sarang dosa, apalagi tidak dipenuhi dengan kebijakan terkait siber yang serba terbatas, sehingga pelayanan administrasi publik terhadap masyarakat juga tidak ada bentuknya," tegas Reja dalam sesi tersebut. Pendekatan ini memudahkan peserta memahami komplikasi politik hukum siber yang jarang dibahas secara mendalam.

Komunitas Nusantara Hukum, dengan lebih dari 5.000 pengikut dari berbagai profesi di bidang politik, hukum, dan pemerintahan, mendukung acara ini sebagai upaya edukasi nasional. Pendiri komunitas Dikri Ilham Husaeni memuji kredibilitas Reja, yang pernah menjabat Staf Ahli Komisi I DPR RI bidang Komunikasi dan Informatika, dan telah diundang puluhan kali karena keahliannya dalam kebijakan komunikasi digital.

Dekan FISIP UPNVJ Dr. S. Bakti Istiyanto menekankan kegiatan ini sebagai wujud Tridharma Perguruan Tinggi, dengan pemberian surat tugas resmi untuk mendorong pengabdian dosen bagi masyarakat. Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Azwar, M.Si., menambahkan bahwa webinar ini memperkuat atmosfer akademik kritis di FISIP, adaptif terhadap isu siber kekinian, serta berwawasan global meski bertindak lokal.

Partisipasi ini mencerminkan komitmen UPNVJ dalam mendukung pemahaman publik terhadap isu siber nasional, sekaligus memperluas jejaring akademik dengan komunitas hukum terbesar di Indonesia.

#### **Kerabat Kerja**

-----  
**Penulis:** Anisa Triselina | **Penyelaras Bahasa:** F. Noor

---

Export tanggal : Sabtu, 10 Januari 2026 Pukul 09:02:32 WIB.

Exported dari [ <https://www.upnvj.ac.id/id/berita/2026/01/dosen-fisip-upnvj-bahas-anomali-politik-hukum-siber-di-webinar-nasional-nusantara-hukum.html> (<https://www.upnvj.ac.id/id/berita/2026/01/dosen-fisip-upnvj-bahas-anomali-politik-hukum-siber-di-webinar-nasional-nusantara-hukum.html>) ]

---